

DAFTAR BAGAN DAN TABEL**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

II.1.	Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019	21
-------	---	----

TABEL

II.2.2.1.a	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	23
II.2.2.1.b	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselonisasi.....	23
II.2.2.1.c	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	24
II.2.2.1.d	SDM Apratur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pendidikan Formal.....	25
II.2.2.1.e	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural.....	26
II.2.2.2.a	Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	27
II.2.2.2.b	Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2017-2018.....	28
II.2.3 T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	36
II.2.2.3.a	Anggaran.....	31
II.2.2.3.b T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Sulawesi Barat.....	37
III.3.1 T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	44
III.3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	50
IV.1 T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	60
V.1 T-C.26	Keselaran antara Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	66
VI.1 T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	68
VII.1 T-C.28	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.....	72

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga perumusan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP – Prov. Sulbar) Periode III Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2022 ini dapat tersusun dan terselesaikan.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang pada salah satu satuan kerja perangkat daerah khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa khususnya pada pembangunan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selaku pintu gerbang sekaligus ujung tombak pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik telah proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil, dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua masyarakat merasa aman dan tentram dari rawan konflik, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan. Kami menyadari perlunya untuk menginspirasi generasi muda dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya kerja sama dan berbagi satu sama lain dan juga diharapkan bisa mempromosikan arti toleransi, saling pengertian dan kerjasama di kalangan generasi muda dan masyarakat dalam masalah antar agama agar tidak terjadi konflik. Namun demikian hal tersebut menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus bekerja dan berkarya untuk pembenahan di segala aspek sebagai mata dan telinga Gubernur

Sulawesi Barat seperti yang tertuang dalam tugas, pokok dan fungsinya yaitu intelijen pemerintah.

Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dan kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan perekonomian dan bagaimana menanamkan dinamika nilai-nilai sosial budaya dan etika politik yang dapat melahirkan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang malaqbi. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai tolok ukur dalam penganggaran SKPD.

Mamuju, 10 Mei 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

DAFTAR ISI

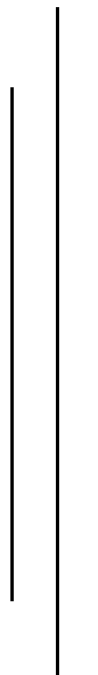
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar, Tabel & Grafik.....	v
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
I. 1. Latar Belakang.....	1
I. 2. Landasan Hukum.....	5
I. 3. Maksud dan Tujuan.....	10
I. 4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
II. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
II. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III.PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	43
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	53
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN.....	58
IV.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar.....	58
BAB V.STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD.....	63
V.1. Stategis dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar....	63
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
VI.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif....	68
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII. PENUTUP.....	73



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

TAHUN 2017 – 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2017-2022

DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju

(0426) 2321806

Satker.kesbangpolsulbar@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Draft Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan yakni meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terfokus pada upaya terwujudnya dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Sulawesi Barat, keamanan dan ketentraman serta ketertiban dalam Ruang Lingkup Kepala Daerah / Para Pejabat Daerah sehingga aktivitas Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sehubungan dengan upaya pengembangan data dan informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang merupakan program kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang termuat pada dokumen perencanaan Renstra periode 2017-2022. Bentuk dari pengembangan data dan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu telah dibuatnya website / situs profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai media dalam pendeskripsian / gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada website tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang dicapai.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, yang mengantarkan **Bapak H. M. ALI BAAL MASDAR** sebagai Gubernur ke-2 di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Mandar / Sulbar yang aman dan damai, adil dan makmur.

Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah merumuskan program-program strategis dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tercermin dalam Visi Daerah sebagai daerah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBIQ”

Untuk mencapai kondisi yang telah digambarkan dalam VISI tersebut, Pemerintah Daerah bersama jajarannya telah melakukan menufer-menufer penting dalam pembangunan yang dititikberatkan pada Pembangunan pada Bidang infrastruktur, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban adalah satu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah terhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain.

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa yang aman, tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila keamanan, ketentraman dan ketertiban dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat Negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undang-undang atau peraturan dibawahnya Peraturan Daerah.

Dokumen Draff Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan maupun program/kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Strategis OPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Dokumen Draff Rancangan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen Draff Rancangan Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun tersebut

akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir daripada Renstra itu sendiri.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam Rancangan Perubahan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah :

- Landasan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila.
- Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945.
- Landasan Operasional.
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan pemanfaatan Sumber Pengion dan Bahan Nuklir;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 29. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
 30. Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 Tanggal 10 Mei 2017, pelantikan Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2017.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
39. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022;
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Draft Rancangan Perubahan Rencana Strategis Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan

untuk memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Draft Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Draft Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
3. Sebagai acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
5. Sebagai dokumen Kontrak Kinerja antara Gubernur dan OPD dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Draft Rancangan Perubahan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian, Draft Rancangan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya Perubahan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dengan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Landasan hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis, serta maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, dan sistematika penulisannya.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan, yang mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dicapai dalam 2 (Dua) tahun terakhir, dan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII. Penutup, pada bagian ini menjelaskan tentang Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah dalam 3 (Tiga) tahun kedepan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 5 Tahun (2017-2022). Tujuan merupakan suatu penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah :

4.1.1. Tujuan

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Tujuan :

1. Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.
2. Memperkuat fungsi keberadaan Ormas yang berorientasi pada wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
3. Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.

Tujuan :

1. Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

4.1.2. Sasaran

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Sasaran : 1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.

2. Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.

Tujuan : 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.

2. Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Tabel 4.1. Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.								
1.	Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	43 Orang SDM Aparatur PNS dan 35 Orang SDM Non PNS.	78 Org	73 Org	78 Org	80 Org	82 Org
2.	Menguatkan fungsi kelembagaan Ormas yang berorientasi pada wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan	Jumlah Ormas / LSM yang terdaftar dan memperoleh SKT.	18 Ormas	17 Ormas	8 Ormas	10 Ormas	12 Ormas

		pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.						
3.	Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Jumlah Ormas / LSM yang terdaftar dan memperoleh SKT.	18 Ormas	17 Ormas	8 Ormas	10 Ormas	12 Ormas
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	160 Org	200 Org	800 Org	960 Org	1000 Org
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.								
4.	Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi.	160 Org	200 Org	440 Org	560 Org	600 Org

		Negara Kesatuan Republik Indonesia.						
5.	Meningkatkan fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pemantauan dan rapat.	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol	16 Parpol

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan;
3. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi, dengan OPD terkait dilingkup Provinsi Sulawesi Barat;
4. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama;
5. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/masyarakat tentang Sistem Demokrasi;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan;

7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan.

Tabel 3.1 Tabel T-B. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan pada Aparatur Badan Kesbangpol.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya informasi dan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian. • Terbatasnya alokasi anggaran.
2.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan.	Belum tersedianya gedung kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.	Ketersediaan lahan yang belum jelas dan komitmen pada kewenangan.
3.	Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi, dengan OPD terkait dilingkup Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi internal. • kurangnya dukungan instansi terkait terhadap pencapaian tupoksi Badan Kesbangpol.
4.	Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan	Kurangnya pelibatan lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi	Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan

	kebangsaan dan kerukunan umat beragama.	Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama.	kebangsaan dan kerukunan umat beragama.
5.	Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga / masyarakat tentang Sistem Demokrasi.	Kurangnya pemahaman aspek dan indikator demokrasi.	Kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan aspek dan indikator demokrasi.
6.	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga / masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.	Lembaga / masyarakat yang dilibatkan belum memahami peran dan fungsinya dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.	Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.
7.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan.	Kurangnya konsultasi dan koordinasi antara instansi serta organisasi masyarakat terkait tugas dan fungsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang terbatas. • Belum tersedianya aplikasi menyangkut data base keberadaan Ormas. • Kurang maksimalnya penerapan dan pelaksanaan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Periode III Tahun 2017 –2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah lima tahun ke depan. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah :

“Sulawesi Barat yang Maju dan Malaqbiq”

Visi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :

- ✚ **Maju** = Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi dan berorientasi pada lingkungan.
- ✚ **Malaqbiq** = Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan sejumlah Misi Pembangunan Daerah. Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. ***Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Berkepribadian dan Berbudaya.*** Misi ini terfokus pada pengertian tentang sumber daya manusia oleh beberapa ahli yaitu : SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsure utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).
2. ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.***

Misi ini terfokus pada pengertian pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya oleh para ahli yaitu : Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara

bentuk Monarkhi dan Republik. Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional* membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan Republik.

3. Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.

Misi ini terfokus pada penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda *supply chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing.

Misi ini terfokus pada pengertian oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi oleh beberapa para ahli yaitu :Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau *steady growth* dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi.

5. Mengarustamakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini terkait dengan penting menjaga lingkung hidup dan kualitas lingkung hidup oleh beberapa para ahli yaitu : Lingkungan Hidup adalah kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

➤ Kualitas lingkungan hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Biofisik

Lingkungan biofisik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Lingkungan biofisik abiotik, yaitu tanah, batuan, mineral, udara, air, energi matahari, dan proses yang berbeda di dalam dan permukaan bumi.
- b. Lingkungan biofisik biotik, yaitu semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai tumbuhan, hewan, dan manusia.

2. Lingkungan Sosial Ekonomi

Manusia secara individual maupun kelompok adalah makhluk sosial, kualitas sosial ekonomi baik jika terpenuhi semua kebutuhan manusia. Kualitas sosial ekonomi dapat tercipta bila mereka memiliki sumber pendapatan yang memadai.

3. Lingkungan Budaya

Lingkungan Budaya adalah segala kondisi berupa materi dan non materi yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya.

Penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 tersebut ditetapkan 20 (Dua Puluh) Program Unggulan , yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan;
- 2) Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean dan green”;
- 3) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 6) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
- 7) Indeks Gini Ratio;
- 8) Disparitas Wilayah;
- 9) Penanggulangan Kemiskinan;
- 10) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
- 11) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 12) Ketahanan Pangan;
- 13) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
- 14) Pengembangan Industri;
- 15) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
- 16) Kualitas Demokrasi;
- 17) Keamanan dan Ketertiban Daerah;**
- 18) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 19) Ketahanan Energi, (Energi Baru Terbarukan);
- 20) Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah yang ada pada bagian 2.1, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan semua misi, yaitu misi kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, **dan lebih terfokus (prioritas) pada misi Pertama dan Kedua.**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Tabel 3.1 diatas, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya				
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 	Masih terbatasnya kemampuan SDM aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek.	SDM aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih berkualitas dari segi Ilmu Pendidikannya.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Ketahanan Seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan. ▪ Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas. 	Masih kurangnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta organisasi kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan anggaran yang terbatas. ▪ Belum tersedianya aplikasi menyangkut data base keberadaan Ormas ▪ Kurang maksimalnya penerapan dan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah tersusunnya Perda No.3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. ▪ Akan dibentuknya Tim Terpadu Ormas yang

			Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018.	melibatkan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 	Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga / masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya anggaran yang mendukung untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tupoksi terkait tentang kestabilan keamanan dan kenyamanan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. ▪ Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum 	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

			dan keamanan.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri. ▪ Program Pendidikan Politik Masyarakat. 	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran lembaga / masyarakat tentang Sistem Demokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan aspek dan indikator demokrasi. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. ▪ Program Pembinaan Karakter Bangsa. 	Masih kurangnya pelibatan lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan umat beragama 	

Keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

**“(1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan (2)
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya”.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Provinsi terhadap sasaran RENSTRA Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

Berikut merupakan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri :

Visi : “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi :1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

- a. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- b. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- c. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Periode Rencana Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014-2019, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Berdasarkan Analisis terhadap Renstra Ditjen Polpum Kemendagri pada khususnya ada 7 Program yaitu :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. Program Ketahanan Ekonomi
5. Program Kewaspadaan Nasional
6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol. Sedangkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Ada 14 Program (5 Program Rutin Non Prioritas & 9 Program Non Rutin Prioritas) terdiri dari :

✚ **Ada 5 Program Rutin Non Prioritas yaitu :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

✚ **Ada 9 Program Non Rutin Prioritas yaitu :**

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
4. Program Fasilitas Politik Dalam Negeri.
5. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
6. Program Pembinaan Karakter Bangsa.

7. Program Pembinaan Ideologi.
8. Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.
9. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Jumlah kegiatan untuk merealisasikan Program pada :

1. Ditjen Polpum Kemendagri ada sekitar 193 Kegiatan/ Tahun
2. Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat ada sebanyak Kegiatan/ Tahun.

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum maupun Renstra Kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya koordinasi kesesuaian program / kegiatan maupun pencapaian sasaran antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Ditjen Polpum maupun kabupaten/kota pada saat penyusunan Dokumen Rancangan Renstra baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota karena keterbatasan kualitas SDM yang kurang memadai;
- b. Dengan tidak adanya harmonisasi Renstra provinsi dan kabupaten / kota sangat menghambat pelayanan SKPD karena provinsi kurang mengetahui apa yang sasaran yang akan dicapai oleh kabupaten/ kota sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sedangkan agregat pertumbuhan suatu provinsi adalah merupakan akumulasi pertumbuhan dari seluruh kabupaten/kota yang berada dibawahnya;
- c. Pada penyusunan Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah menelaah Renstra provinsi, oleh karena itu sudah ada beberapa kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
- d. Adanya beberapa kali perubahan nomenklatur yang awalnya Ditjen Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dan perubahan nomenklatur yang terakhir ini yaitu Ditjen Politik dan

Pemerintahan Umum yang mana arah perubahan nomenklatur ini didasari oleh dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Oleh karena dasar tersebut maka khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahun kedepan ini memasukkan beberapa kegiatan yang sifatnya sangat pentingnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis adalah Perencanaan strategis 5 Tahun kedepan dalam sebuah SKPD yang baik dan berpedoman terhadap RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN, serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait seyogyanya juga harus memperhatikan RTRW dan KLHS Provinsi. Tahap penyusunan RTRW dan KLHS di Provinsi Sulawesi Barat hingga pada saat penyusunan renstra masih dalam bentuk draft. Namun demikian penyusunan Rancangan Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tetap memperhatikan draft RTRW dan KLHS serta dokumen perencanaan lainnya Provinsi Sulawesi Barat.

Implikasi RTRW dan KLHS sangat penting untuk pemetaan dan perlakuan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah berikut potensi yang dimiliki. RTRW dan KLHS juga ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (RUP – BKBP Prov. Sulbar) agar sinergitas pembangunan lebih terarah khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan kendala penetapan RTRW dan KLHS berikut belum tersusunnya RUP-BKBP juga turut menghambat pengambilan arah kebijakan, akan

tetapi kendala tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan SKPD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD BAB II dan permasalahan pada bagian 3.1 maka Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov.Sulbar) yang dikompilasikan dengan program nasional teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan kapasitas intelijen bagi aparat Kesbangpol.
- b. Peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi kemasyarakatan.
- d. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Peningkatan kewaspadaan dini dan Penanganan konflik sosial.
- f. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 (Lima) Tahun yang menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2022. Strategis dan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat guna mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan, perlu memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

❖ **Faktor Internal**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

❖ **Faktor Eksternal**

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

❖ **Penyusunan Strategis**

Strategis diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

- *Strengths - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
- *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
- *Strengths – Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
- *Weakness – Threats Strategy*, yaitu merupakan strategis pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Tabel 5.1 Tabel T-C.26
Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq							
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.							
Tujuan		Sasaran		Strategis		Kebijakan	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	1.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.	1.	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat.
						3.	Peningkatan pembangunan Gender.
		2.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tentram.	2.	Mengembangkan kearifan lokal masyarakat.	1.	Peningkatan nilai budaya kearifan lokal.
						2.	Peningkatan norma budaya kearifan lokal.
						3.	Penguatan peran lembaga adat/lembaga masyarakat dan keluarga.

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq							
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya							
Tujuan		Sasaran		Strategis		Kebijakan	
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik.	1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemerintahan yang akuntabel dan modern.	1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui peningkatan dukungan sistem data dan informasi terintegrasi menuju Good Governance.	3.	Penataan dan penguatan organisasi.
						6.	Penguatan akuntabilitas kinerja.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan : Peningkatan SDM yang berkualitas.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan fokus pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; Kegiatan Sosialisasi Permendagri No.07 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian; Kegiatan Sosialisasi Peran Serta Kaum Wanita Dalam Perkembangan Politik; Rapat Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik se-Sulawesi Barat; Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbang Pol. se-Provinsi Sulawesi Barat; Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah; Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah; Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedural (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

2. Arah Kebijakan : Pentingnya pendidikan politik yang beretika dan berbudaya.

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan fokus pada Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat; Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula; Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Berdemokrasi; Penyusunan Data Base Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik.

3. Arah Kebijakan : Tertanamnya rasa solidaritas pada masyarakat.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan & Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, dengan fokus pada Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat; Sosialisasi Wawasan Kebangsaan; Seminar / Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa. Forum Ideologi Penguatan dan Ketahanan Ideologi Pancasila; Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda; Sosialisasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat; Dialog & Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan

Generasi Muda; Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

- 4. Arah Kebijakan : Terciptanya stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban.**

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan fokus pada Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Konflik; Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing; Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Konflik Sosial; Antisipasi Cegah Dini Terhadap Konflik Sosial; Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial; Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);

- 5. Arah Kebijakan : Meningkatnya fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang stabil.**

Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan fokus pada Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.

Selain itu terdapat program dan kegiatan rutin yang bertujuan meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintah, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran apa yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini yang akan ditampilkan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Tabel T-C.28. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Misi 1 : Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya							
1.2	Angka Kriminalitas	15,35	16,01	13,84	13,04	12,22	11,36	11,36
2	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya							
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Periode 2017-2022.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat serta merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dijabarkan dalam Renja RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat di masa yang akan

datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini.

Mamuju, 10 MEI 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sulawesi Barat

Drs. MUHAMMAD RAHMAT, MM

NIP : 19640408 198603 1 023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun

2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Gubernur tersebut adalah dengan menetapkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

1. Sekretariat Badan.

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretaria Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kerja.

Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di

bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitorin, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan Kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

- perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

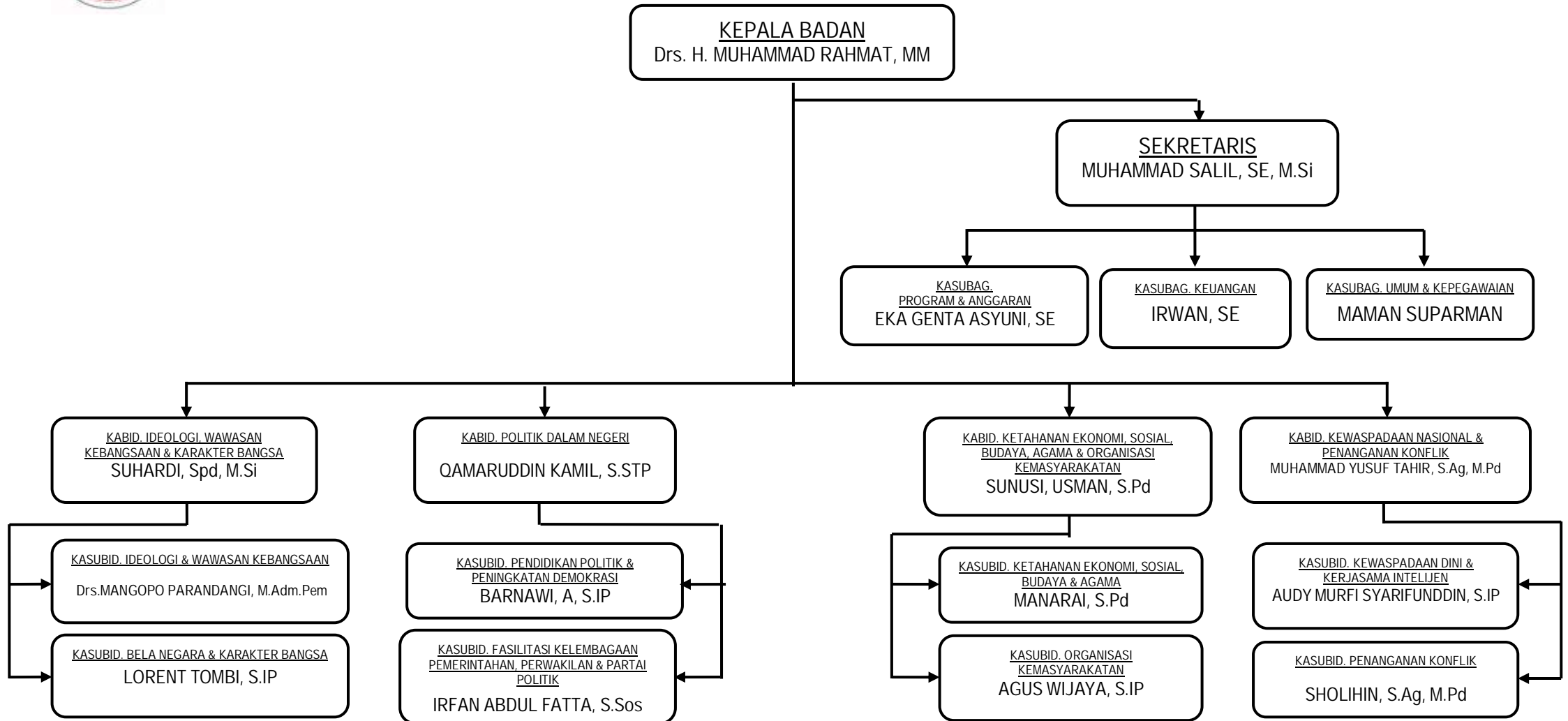
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Sub Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.



**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP)

2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan tugas-tugas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sub bagian kepegawaian sampai pada bulan Desember 2017 berjumlah 77 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada gambar 2.2.1.a. dengan jenjang eselonering, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bermitra dengan OPD atau beberapa instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melalui 5 (lima) Bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Daerah; Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 77 orang yang terdiri dari 43 orang ASN dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat juga tidak dibantu oleh petugas keamanan dan petugas kebersihan karena di dalam kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat telah ada petugas Satpol PP dan petugas clean servis yang telah dipekerjakan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya berjumlah 77 orang.

Tabel 2.2.1.a. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	ASN	34	42,85	9	14,28	43	55,84
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13	16,88	21	27,21	44	44,15
Jumlah		47	59,7	30	41,49	77	99,99

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat / golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu dan diklat perjenjangan yang pernah diikuti.

Tabel 2.2.1.b. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselonisasi

a. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Eselonisasi.

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	Eselon II	1	5,29	-	-	1	5,29
2.	Eselon III	5	6,49	-	-	5	6,49
3.	Eselon IV	8	10,38	2	2,59	10	12,98
4.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
5.	Staf	18	23,37	9	11,68	27	35,06
6.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13	16,88	21	27,21	44	44,15
Total		45	62,41	32	41,48	87	103,97

b. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah golongan III yaitu sebanyak 9 orang atau

Tabel 2.2.1.c. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pegawai	Gol / Ruang	Jenis Kelamin				Total	
			L	%	P	%	Σ	%
1.	Pembina Utama Madya	IV.d	1	2,32	-	-	1	2,32
2.	Pembina Utama Muda	IV.c	-	-	-	-	-	-
3.	Pembina Tingkat I	IV.b	3	6,97	-	-	3	6,97
4.	Pembina	IV.a	3	6,97	-	-	3	6,97
5.	Penata Tingkat I	III.d	5	11,62	2	4,65	7	16,27
6.	Penata	III.c	5	11,62	1	2,32	6	13,94
7.	Penata Muda Tingkat I	III.b	2	4,65	2	4,65	4	9,3
8.	Penata Muda	III.a	7	16,27	2	4,65	9	20,93
9.	Pengatur Tingkat I	II.d	1	2,32	1	2,32	2	4,64
10.	Pengatur	II.c	1	2,32	-	-	1	2,32
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	4	9,30	1	2,32	5	11,62
12.	Pengatur Muda	II.a	-	-	2	4,65	2	4,65
Total			32	74,41	11	25,58	43	100

c. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagai besar pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah lulusan strata 1 (S1) yaitu sebanyak orang atau , dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.1.d. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pendidikan Formal**

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1.	Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2.	Setingkat Magister (S2)	7	16,27	-	-	7	16,27
3.	Setingkat Sarjana (S1)	17	39,53	7	16,27	24	55,08
4.	D.III	4	9,30	1	2,32	5	11,62
5.	Setingkat SMA	4	9,30	3	6,97	7	16,37
6.	Setingkat SMP	-	-	-	-	-	-
7.	Setingkat SD	-	-	-	-	-	-
Total		32	74,41	11	25,58	43	100

d. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural.

SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural yang pernah diikuti disamping pendidikan formal. ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat juga mendapat Diklat Struktural dan Fungsional yaitu dari 43 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 0,00 % telah mengikuti Lemhanas 0,00 % mengikuti Diklat PIM III 0,00 % mengikuti PIM IV 0,00%, seluruh ASN yang telah memenuhi prasyarat seyogyanya mendapatkan kesempatan yang untuk mengikuti diklat struktural maupun fungsional, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.e. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural**

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	Lemhanas	-	-	-	-	-	-
2.	Diklat PIM I	-	-	-	-	-	-
3.	Diklat PIM II	1	2,32	-	-	1	2,32
3.	Diklat PIM III	6	13,95	1	2,32	7	16,27
4.	Diklat PIM IV	9	20,93	2	4,65	11	25,58
5.	Diklat Prajabatan	18	41,86	6	13,95	24	55,81
Total		34	79,06	9	20,93	43	100

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dari segi sarana dan prasarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun masih diperlukan.

Saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jl. KH. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- Separuh Gedung Kantor Sayap Paling Kanan yang terdiri atas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang Bendahara, 1 (satu) ruang Sekretaris beserta 3 Kasubag dan para stafnya serta 1 (satu) ruang untuk 4 Bidang yaitu (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Daerah; Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan).

Daftar Inventarisasi Barang mulai tahun 2012 s/d 2018

Tabel 2.2.2.a

Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dari 2012 s/d 2018

No.	Sarana	Jumlah	Tahun Pengadaan							Tahun Sebelumnya
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Kendaraan									
1	Kendaraan Roda 2	9 Unit		3	3		3			
2	Kendaraan Roda 4	4 Unit			2		2			
	Meja									
3	Meja II	2 Unit					2			
4	Meja Eselon III	8 Unit		5			3			
5	Meja Eselon IV	11 Unit		11						
6	Meja Rapat	1 Unit			1					

7	Meja Kerja	13 Unit						13		
8	Kursi / Sofa									
9	Sofa	1 Unit	1							
10	Kursi Eselon III	5 Unit		5						
11	Kursi Eselon IV	11 Unit		11						
12	Kursi Pegawai	10 Unit				10				
13	Kursi Pegawai Non Struktural	15 Unit					15			
	Lemari									
14	Lemari Besi	6 Unit		6						
15	Lemari Arsip	8 Unit			3		5			
16	Filling Besi	5 Unit				5				

	Peralatan Komputer									
17	P.C Unit	10 Unit		2			4	4		
18	Laptop	18 Unit		10			5	3		
19	Printer	18 Unit		7			5	3	3	
20	Server	1 Unit					1			
	Peralatan Gedung Kantor									
21	AC Split	7 Unit		4			3			
22	Handy Cam	1 Unit		1						
23	Scanner	1 Unit		1						
24	Camera Electronic	2 Unit		2						
25	Rak	2 Unit				2				

26	Lemari Es	1 Unit				1				
27	Mesin Fotocopy	1 Unit					1			
28	Proyektor	1 Unit					1			
29	Power Supply	1 Unit					1			
30	Televisi	1 Unit						1		

Tabel 2.2.2.b

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2017-2018

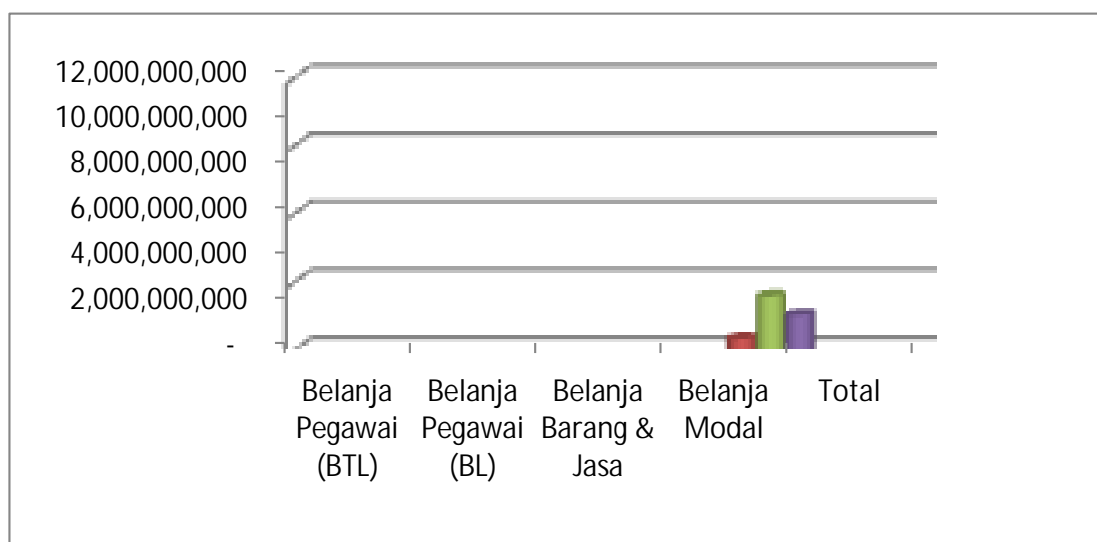
Aset SKPD sampai Tahun	2017	2018	Ket
Aset yg digunakan	2.040.691.350	2.083.561.350	
Aset yg tdk digunakan/rusak berat	1.050.550.266	1.050.550.266	
Total Aset SKPD	990.141.084	1.033.011.084	

2.2.3 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Barat. Khusus untuk Tahun Anggaran 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.8.840.935.219,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.623.329.490,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.217.605.729,-. Secara lengkap anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 2.2.3.a. dibawah ini :

Jenis Belanja	5 Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.761.451.290	3.123.113.523	3.547.643.294	3.623.329.490	3.838.464.553
Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	2.761.451.290	3.123.113.523	3.547.643.294	3.623.329.490	3.838.464.553
Belanja Langsung	3.600.000.000	4.387.304.000	6.476.565.938	5.217.605.729	3.395.000.000
Belanja Pegawai	-	-	-	51.100.000	55.300.000

Belanja Barang dan Jasa	3.046.900.000	4.338.304.000	5.575.616.938	5.026.505.729	3.277.640.000
Belanja Modal	553.100.000	49.000.000	900.949.000	140.000.000	62.060.000
TOTAL	6.361.451.290	7.510.417.523	10.024.209.232	8.840.935.219	7.233.464.553



	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Pegawai (BTL)	2.761.451.290	3.123.113.523	3.547.643.294	3.623.329.490	3.838.464.553
Belanja Pegawai (BL)	-	-	-	51.100.000	55.300.000
Belanja Barang & Jasa	3.046.900.000	4.338.304.000	5.575.616.938	5.026.505.729	3.277.640.000
Belanja Modal	553.100.000	49.000.000	900.949.000	140.000.000	62.060.000
Total	6.361.451.290	7.510.417.523	10.024.209.232	8.840.935.219	7.233.464.553

Anggaran yang disediakan belum dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang menyangkut pelaksanaan program tentang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terdapat pada program kegiatan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKPD, sebagaimana yang terlihat pada **tabel 2.2.3.b berikut ini file excel :**

2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah bagian dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibekukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan bagi setiap Bagian / Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun standar operasional prosedural kerja yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Bagian / Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan :

1. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
3. Mempertegas tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara proporsional;
6. Menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme;

7. Memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sudah menetapkan Standar Operasional Prosedural pada tahun 2016 dan SOP dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) administrasi pemerintahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Standar Operasional Prosedural (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun, mengimplementasikan dan mempertahankan kualitas prosedur yang ditetapkan untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Adapun komitmen dan tanggungjawab manajemen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam Standar Operasional Prosedural (SOP), antara lain :

1. SOP tentang Penyusunan Renstra
2. SOP tentang Lembaga Teknis Daerah
3. SOP tentang Keuangan Daerah
4. SOP tentang Tugas dan Fungsi
5. SOP tentang KOMINDA
6. SOP tentang FKDM
7. SOP tentang FPK
8. SOP tentang FKUB
9. SOP tentang ORMAS
10. SOP tentang Pemantauan Orang Asing
11. SOP tentang PPWK
12. SOP tentang Politik
13. SOP tentang Penanganan Konflik Sosial.
14. SOP tentang Pelestarian Budaya Lokal.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Menyelenggarakan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
3. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;
6. Menyelenggarakan penyampaian konsep program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur;
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
8. Menyelenggarakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Tabel 2.3.a. Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai tupoksi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Jumlah Demo Bidang Politik	√	100,00		20	18	15	10	5		52	1	0	3	13		260,00	5,56	6,67	30,00	260,00	
2.	Jumlah Demo Ekonomi	√	100,00		15	15	10	8	5		40	0	3	0	35		266,67	0,00	30,00	0,00	700,00	
3.	Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	√	100,00		5	4	3	2	1		0	0	0	0	2		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
4.	Jumlah Demo Unjuk Rasa	√	100,00		20	18	16	12	10		30	3	2	65	50		150,00	16,67	12,50	541,50	500,00	

Tabel 2.3.b. Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Belanja Tidak Langsung	2.761.451.290	3.123.113.523	3.547.643.294	3.623.329.490	3.838.464.553	3.725.151.035	2.641.741.286	3.092.600.798	3.575.380.169	3.543.283.630	3.688.546.751	3.655.333.253
Belanja Langsung	3.600.000.000	4.387.304.000	6.476.565.938	5.217.605.729	3.395.000.000	4.868.480.360	3.407.392.693	4.343.933.803	6.423.374.506	5.009.858.771	3.052.318.422	4.649.968.603
Total Jumlah	6.361.451.290	7.510.417.523	10.024.209.232	8.840.935.219	7.233.464.553	8.593.631.395	6.049.133.979	7.436.534.601	9.998.754.675	8.553.142.401	6.740.865.173	8.305.301.856

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)
Belanja Tidak Langsung	95,66	99,02	100,00	97,79	96,09	98,13		
Belanja Langsung	94,65	99,01	99,18	96,02	89,91	95,51		

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub-sub sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat :

1. Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait.
4. Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumn

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan.

1. Dukungan APBD masih terbatas.

APBD Provinsi Sulawesi Barat terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, baik yang bersumber dari PAD, DAU, DAK maupun sumber dana lainnya, sehingga dibutuhkan kerja ekstra untuk bisa mendapatkan anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemberdayaan SDM yang belum optimal.

Sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum diberdayakan secara optimal, yang antara lain disebabkan masih kurangnya SDM, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk dapat mendukung terlaksananya pekerjaan secara efisien dibutuhkan kesungguhan dari segenap SDM yang ada.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum oleh karena belum adanya pembangunan gedung kantor, dan fasilitas peralatan/perlengkapan gedung kantor.

4. Mencermati tentang perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

Beberapa pandangan menyatakan, benih radikalisme muncul dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta faktor ketidakadilan. Namun, akhir-akhir ini yang sering terjadi justru radikalisme agama. Kesalahan dalam menafsiran suatu ajaran-ajaran, diduga menjadi salah satu penyebab maraknya radikalisme agama. Akhirnya yang terjadi adalah sikap merasa benar sendiri. Lalu, dimana saja benih-benih radikal itu muncul? benih radikalisme ini muncul bisa saja dari keluarga, kampus bahkan tempat ibadah sekalipun. Kini seiring dengan perkembangan teknologi, benih radikalisme juga mulai menjamur di dunia maya.

5. Penanganan masalah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gerakan Narkoba).

Peredaran Narkoba di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi persoalan yang serius karena jumlah penyalahgunaan Narkoba di Sulbar setiap tahun semakin meningkat, dan saat ini mencapai 11.151 orang atau 1,8 persen dari jumlah penduduk Sulbar (hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI). Peredaran Narkoba yang semakin merambah ke semua golongan masyarakat terutama generasi muda, dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup bangsa, serta akan berdampak negatif pada pembangunan Negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, peredaran Narkoba di Sulbar sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama aparat penegak hukum. Namun, fenomena yang terjadi saat ini di Sulbar, oknum aparat penegak hukum justru terlibat langsung dalam peredaran dan penggunaan Narkoba sehingga menyulitkan pemberantasan Narkoba di Sulbar.

“Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur terkait dan aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berpikir dari kelompok masyarakat yang sudah kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan / peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayahnya Gubernur dalam melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi, menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bersama dengan DPRD sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

2.4.2 Peluang

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat hal ini terbukti dengan rendahnya persentase pemberian anggaran yang dialokasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya.
2. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang sangat strategis dimana berada diantara 2 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berhadapan langsung dengan selat Makassar. Posisi strategis tersebut sangat memungkinkan untuk Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat dengan mudah melakukan kerjasama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban wilayah.
3. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pelayanan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin bertambah terutama dengan membina mitra kerja yang ada misalnya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Badan Intelijen Daerah (BINDA), Organisasi Masyarakat (ORMAS), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pemantauan Orang Asing dan forum-forum lainnya yang resmi menurut aturan yang ada.

4. Keinginan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat yang selalu meningkat.
5. Keamanan yang selalu dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
PERIODE TAHUN 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
									THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target
									Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		
		1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI											
		1	19	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1	19	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran.	1.224.945.729	12 Bln	929.780.000	12 Bln	1.113.005.500	12 Bln	1.387.854.743	12 Bln	1.319.550.000	12 Bln
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah PTT yang dibayarkan gajinya dan Jumlah surat masuk keluar.	293.000.000,00	35 Org PTT & 4000 Surat	328.400.000,00	35 Org PTT & 4000 Surat	420.390.000,00	35 Org PTT & 4000 Surat	420.692.500,00	35 Org PTT & 4000 Surat	500.250.000	35 Org PTT & 4000 Surat
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran bulan rekening telepon, air dan listrik.	13.700.000,00	36 bulan	18.000.000,00	36 bulan	14.028.000,00	36 bulan	12.000.000,00	36 bulan	18.500.000	36 bulan
						3 Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah item alat tulis kantor.	46.875.000,00	22 Macam	40.000.000,00	22 Macam	44.495.500,00	22 Macam	45.392.500,00	22 Macam	50.000.000	22 Macam
						4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah lembar fotocopy dan spanduk baliho.	13.000.000,00	3.600 lembar fotocopy & spanduk baliho.	30.000.000,00	3.600 lembar fotocopy & spanduk baliho.	34.692.000,00	3.600 lembar fotocopy & spanduk baliho.	35.400.000,00	3.600 lembar fotocopy & spanduk baliho.	52.000.000	3.600 lembar fotocopy & spanduk baliho.
						5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah penerbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	40.500.000,00	10 Kali Terbit	40.000.000,00	10 Kali Terbit	24.000.000,00	10 Kali Terbit	200.000.000,00	10 Kali Terbit	57.000.000	10 Kali Terbit
						6 Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah kotak makan minum rapat dan tamu.	30.500.000,00	1272 Kotak	30.000.000,00	1272 Kotak	35.400.000,00	1272 Kotak	48.240.000,00	1272 Kotak	65.500.000	1272 Kotak

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)			
									Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10			
						7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	337.765.000,00	35 koordinasi	200.000.000,00	35 koordinasi	270.000.000,00	35 koordinasi	326.129.743,45	35 koordinasi	275.750.000	40 koordinasi
						8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	449.605.729,20	68 koordinasi	243.380.000,00	68 koordinasi	270.000.000,00	68 koordinasi	300.000.000,00	68 koordinasi	300.550.000	75 koordinasi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1	19	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur.	355.300.000	1 Paket & 12 Bulan	251.350.000	1 Paket & 12 Bulan	312.625.000	1 Paket & 12 Bulan	242.159.146	1 Paket & 12 Bulan	754.750.000	1 Paket & 12 Bulan
						1	Pengadaan Mobil Jabatan.	Jumlah pengadaan mobil jabatan.	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	250.000.000	1 unit
						2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan dinas / operasional.	-	0 unit	23.760.000,00	0 unit	-	0 unit	-	3 unit	75.000.000	3 unit
						3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.	99.200.000,00	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	2 paket	45.000.000	3 paket
						4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.	40.800.000,00	0 paket	42.870.000,00	2 paket	48.425.000,00	2 paket	-	2 paket	75.000.000	3 paket
						5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor setiap bulan.	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan
						6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan setiap bulan.	75.300.000,00	12 bulan	72.420.000,00	12 bulan	105.700.000,00	12 bulan	105.700.000,00	12 bulan	78.750.000	12 bulan
						7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional setiap bulan.	119.900.000,00	12 bulan	95.300.000,00	12 bulan	134.500.000,00	12 bulan	130.300.000,00	12 bulan	115.000.000	12 bulan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)					
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target			
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10			
				8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor setiap bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	31.000.000	12 bulan	
				9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor setiap bulan.	20.100.000,00	12 bulan	17.000.000,00	12 bulan	24.000.000,00	12 bulan	6.159.146,00	12 bulan	35.000.000	12 bulan	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1	19	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	Cakupan persentase disiplin aparatur.	-	80%	76.490.000	85%	98.294.350	90%	154.304.860	95%	116.250.000	95%
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas yang telah tersedia.	-	80%	76.490.000	85%	98.294.350	90%	154.304.860	95%	116.250.000	95%	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemerintahan yang akuntabel dan modern.	1	19	01	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	Nilai kompetensi dan integritas ASN.	202.415.000	80	461.380.000	80	476.271.650	90	426.000.000	95	674.987.935	95
				1	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah ASN yang telah mengikuti PIM III, IV dan pelatihan lainnya.	22.700.000	2 Org	10.000.000	5 Org	33.300.000	10 Org	27.000.000	5 Org	25.000.000	10 Org	
				2	Rapat Kerja Teknis & Sinkronisasi Kegiatan KesbangPol. se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yg mengikuti rakertek dan sinkronisasi kegiatan Kesbangpol. se-Sulbar.	-	40 Org	50.000.000	40 Org	53.411.650	40 Org	125.000.000	40 Org	100.000.000	40 Org	
				3	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah.	Jumlah peserta yg mengikuti rakor tim verifikasi, monev & pelaporan Bantuan Dana Hibah.	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	74.987.936	50 Org	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)						
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
				6	Rapat Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.	Jumlah peserta monev pelaksanaan penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.	-	40 Org	40.000.000	0 Org	-	40 Org	50.000.000	0 Org	70.000.000	40 Org		
				7	Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis.	Jumlah tim fasilitasi pengolah data, analisis informasi & kajian strategis.	-	0 Tim	-	0 Tim	-	0 Tim	-	0 Tim	70.000.000	1 Tim		
				8	Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA).	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FORKOPIMDA.	179.715.000	4 Kali & 100 Org	361.380.000	4 Kali & 100 Org	389.560.000	4 Kali & 100 Org	224.000.000	4 Kali & 100 Org	334.999.999	4 Kali & 100 Org		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemerintahan yang akuntabel dan modern.	1	19	01	05	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Rp	148.100.000	CC	110.500.000	CC	124.913.500	BB	134.800.724	BB	208.500.000	BB
				1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun.	13.100.000	2 Lap.	8.000.000	2 Lap.	10.500.000	2 Lap.	10.000.000	2 Lap.	10.500.000	2 Lap.		
				2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun.	8.475.000	1 Lap.	5.000.000	1 Lap.	10.000.000	1 Lap.	9.500.000	1 Lap.	10.500.000	1 Lap.		
				3	Penyusunan Renstra-Renja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	-	1 Dok.Re nstra & 1 Renja	5.000.000	1 Dok.Re nja	14.678.600	1 Dok.Re nja	10.000.000	1 Dok.Ren ja	12.500.000	1 Dok.Re nja		
				4	Penyusunan RKA/DPA-SKPD.	Jumlah dokumen RKA / DPA - SKPD yang tersusun.	44.900.000	2 Dok. RKA /DPA	5.000.000	0 Dok. RKA /DPA	12.500.000	2 Dok. RKA /DPA	10.000.000	2 Dok. RKA /DPA	12.500.000	2 Dok. RKA /DPA		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)					
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
				5	Penyusunan RKA-P/ DPPA - SKPD.	Jumlah dokumen RKA-P / DPPA-SKPD yang tersusun.	10.300.000	2 Dok. RKA /DPPA	4.000.000	0 Dok. RKA /DPA	12.500.000	2 Dok. RKA /DPPA	8.728.000	2 Dok. RKA /DPPA	12.500.000	2 Dok. RKA /DPPA	
				6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan program SKPD.	59.000.000	4 Lap.	79.500.000	4 Lap.	50.000.000	4 Lap.	75.000.000	4 Lap.	70.000.000	4 Lap.	
				7	Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKJ.	Jumlah dokumen laporan inti yang telah tersusun.	12.325.000	3 Lap.	4.000.000	3 Lap.	14.734.900	3 Lap.	11.572.724	3 Lap.	15.000.000	3 Lap.	
				8	Penyusunan ANJAB dan ABK	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah tersusun.	-	0 Lap.	-	0 Lap.	-	0 Lap.	-	2 Lap.	65.000.000	2 Lap.	
SEKRETARIAT						1.930.760.729		1.829.500.000		2.125.110.000		2.345.119.473		3.074.037.935			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenram	1	19	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.	Tingkat persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) melalui beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	380.000.000	40 Orang & 6 Kab.	470.277.000	40 Orang & 6 Kab.	420.000.000	40 Orang & 6 Kab.	628.000.000	40 Orang & 6 Kab.	1.015.000.000	40 Orang & 6 Kab.
				1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial.	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial.	150.000.000	40 Org	199.600.000	40 Org	200.000.000	40 Org	200.000.000	40 Org	225.000.000	40 Org	
				2	Pemantauan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Pelaksanaan Pilkada Serentak.	Jumlah kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan pemantauan ATHG.	-	0 Kab.	0	0 Kab.	0	0 Kab.	0	0 Kab.	0	0 Kab.	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				3	Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Jumlah kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing.	100.000.000	6 Kab.	92.577.000	6 Kab.	150.000.000	6 Kab.	100.000.000	6 Kab.	100.000.000	6 Kab.
				4	Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).	Jumlah peserta yang mampu antisipasi dini dan cegah dini.	-	40 Org	63.650.000	0 Org	0	40 Org	100.000.000	40 Org	100.000.000	40 Org
				5	Penyusunan Profil Peta Konflik dan Rawan Konflik Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah dokumen (buku) profil konflik dan rawan konflik Provinsi Sulawesi Barat.	-	0 Dok.	0	0 Dok.	0	0 Dok.	0	1 Dok.	50.000.000	0 Dok.
				6	Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	Jumlah laporan orientasi peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	-	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan
				7	Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini Daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	-	0 Org	0	0 Org	-	50 Org	228.000.000	0 Org	-	0 Org
				8	Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah kader yang dibentuk untuk Revolusi Mental.	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	100.000.000	40 Org
				9	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial.	130.000.000	40 Org	114.450.000	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				10	Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah.	Jumlah peserta kegiatan forum dialog komunitas intelijen daerah.	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				11	Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Aparat di Daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti diklat intelijen.	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	80.000.000	40 Org
				12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Jumlah laporan monev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	0	0 Dok. Lap.	0	0 Dok. Lap.	0	0 Dok. Lap.	0	1 Dok. Lap.	75.000.000	1 Dok. Lap.
				13	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelijen Daerah Sulbar.	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	85.000.000	40 Org
				14	Antisipasi Dini, Cegah Dini, Pahami Radikalisme dan Terorisme.	Jumlah peserta antisipasi dini, cegah dini, paham radikalisme dan terorisme.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	125.000.000	0 Org
				15	Rapat Rutin Teknis Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta rapat TKD Provinsi Sulawesi Barat.	0	0 Org & 0 Kali Pertemuan	0	0 Org & 0 Kali Pertemuan	0	0 Org & 0 Kali Pertemuan	0	0 Org & 0 Kali Pertemuan	0	0 Org & 0 Kali Pertemuan
				17	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah dukungan operasional tim terpadu penanganan konflik sosial.	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	3 Dok. 37 Org & 3 Pelaknaan	75.000.000	3 Dok. 37 Org & 3 Pelaknaan

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
									THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target
									Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		
						19 Pemantuan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif.	0	0 Kab.	0	6 Kab.	70.000.000	6 Kab.	0	0 Kab.	0	6 Kab.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenram	1	19	01	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN.	Tingkat persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketramtaman dan Keindahan) melalui beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	-	40 Orang & 6 Kab.	-	40 Orang & 6 Kab.	130.000.000	40 Orang & 6 Kab.	100.000.000	40 Orang & 6 Kab.	85.000.000	40 Orang & 6 Kab.
						1 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat.	-	0 Org	-	40 Org	130.000.000	40 Org	100.000.000	40 Org	85.000.000	40 Org
Jumlah Pagu Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.							380.000.000		470.277.000		550.000.000		728.000.000		1.100.000.000		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1	19	01	08	PROGRAM FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI	Cakupan persentase verifikasi bantuan keuangan Parpol, IDI & Data Base Parpol serta yang ASN yang mengikuti perkembangan evaluasi politik di daerah.	535.000.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol	394.589.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol	601.890.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol	650.000.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol	480.000.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol
						1 Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	100.000.000	16 Partai	100.000.000	16 Partai	63.560.000	16 Partai	100.000.000	16 Partai	100.000.000	16 Partai

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target	
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			2	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi.	100.000.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	119.589.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	179.982.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	250.000.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	150.000.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator
			3	Penyusunan Data Base Kelembagaan Partai Politik.	Tersusunnya database Partai Politik sebagai peserta Pemilu.	0	0 Partai	0	0 Partai	0	0 Partai	0	12 Partai	60.000.000	0 Partai
			4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif.	335.000.000	5 Dok. Lap.	175.000.000	5 Dok. Lap.	358.348.000	5 Dok. Lap.	300.000.000	5 Dok. Lap.	170.000.000	5 Dok. Lap.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia.	1 19 01 08		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Cakupan persentase peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pengembangan etika politik dalam segala aspek kehidupan berdemokrasi.	Rp -	40 Orang	75.000.000	40 Orang	500.000.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	420.000.000	40 Orang
			1	Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat.	Mampu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat di tempat dimana dia berada.	-	0 Dok. Lap.	-	0 Dok. Lap.	-	0 Dok. Lap.	-	1 Dok. Lap.	70.000.000	1 Dok. Lap.
			2	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat bagi pemilih pemula.	0	0 Org	0	400 Org	500.000.000	50 Org	150.000.000	35 Org	75.000.000	35 Org
			3	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Meningkatnya pemahaman tentang berpolitik bagi kaum perempuan dalam kehidupan berdemokrasi.	0	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	30 Org	60.000.000	45 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				4	Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Pelaksanaanya fungsi lembaga partai politik dalam kehidupan berdemokrasi.	0	0 Dok. Lap.	0	0 Dok. Lap.	0	1 Dok. Lap.	100.000.000	1 Dok. Lap.	75.000.000	1 Dok. Lap.
				5	Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga - Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga - lembaga demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat..	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	30 Org	70.000.000	35 Org
				6	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.	0	35 Org	75.000.000	0 Org	0	0 Org	100.000.000	0 Org	0	0 Org
				6	Sosialisasi Permendagri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Permendagri tentang Bantuan Partai Politik.	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	35 Org	70.000.000	40 Org
Jumlah Pagu Bidang Politik Dalam Negeri					535.000.000		469.589.000		1.101.890.000		1.000.000.000		900.000.000			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tentram.				PROGRAM KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN	Persentase penegakan PERDA melalui Perda tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkoba dan cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Ormas.	1.197.845.000	40 Orang	191.455.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	550.000.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target		
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				1	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se - Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat.	107.805.000	0 Org	-	40 Org	75.000.000	40 Org	150.000.000	0 Org	-	0 Org
				2	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	-	0 Org	-	40 Org	100.000.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org
				3	Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se - Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kelembagaan FKUB se-Sulawesi Barat.	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	40 Org
				4	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	150.000.000	0 Kali
				5	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	120.000.000	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	125.000.000	1 Kali	150.000.000	0 Kali
				6	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	-	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	50.000.000	0 Kali	-	0 Kali
				7	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se - Sulbar.	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar.	150.000.000	40 Org	191.455.000	40 Org	175.000.000	40 Org	75.000.000	0 Org	-	40 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)			
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10			
				8 Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	-	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	150.000.000	0 Kali	-	1 Kali
				9 Rapat Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Ketahanan Ekonomi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti rakor dan pemantauan perkembangan ketahanan ekonomi Sulawesi Barat.	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	40 Org
				10 Sosialisasi Perda No.03 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perda No.03 Tahun 2016 tentang pencegahan, penyalahgunaan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.	820.040.000	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemerintahan yang akuntabel dan modern.				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI DAN KEBERADAAN ORMAS.	250.000.000	10	90.179.000	10	175.000.000	-	-	12	450.000.000	12
				1 Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti tim identifikasi, monitoring, evaluasi dan penanganan Ormas.	250.000.000	0 Org	-	30 Org	100.000.000	0 Org	-	30 Org	150.000.000	30 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				2	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	-	30 Org	90.179.000	30 Org	75.000.000	0 Org	-	30 Org	100.000.000	30 Org
				3	Sosialisasi dan Desiminasi Permendagri No. 57 Tentang Pendaftaran dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan dan peserta dalam sosialisasi dan desiminasi Permendagri No.57 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas.	-	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org	-	0 Kali & 0 Org	-	1 Kali & 40 Org	100.000.000	0 Kali & 0 Org
				4	Tim Terpadu Pengawasan dan Evaluasi Ormas.	Jumlah tim terpadu yang terbentuk untuk pengawasan dan evaluasi Ormas	-	0 Tim	-	0 Tim	-	0 Tim	-	1 Tim	100.000.000	0 Tim
Jumlah Pagu Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						1.447.845.000		281.634.000		525.000.000		550.000.000		750.000.000		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tentram.				PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA	Cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pada pembinaan karakter bangsa.	-	40 Orang	175.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	650.000.000	40 Orang
				1	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan bagi Pemuda dan Perempuan.	0	40 Org	75.000.000	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)			
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10			
			2	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah movep pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	1 Lap.	100.000.000	0 Lap.
			3	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
			4	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
			5	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0	40 Org	100.000.000	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
			6	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	100.000.000	0 Org	0	40 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target		
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				7	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0	0 Org	0	40 Org	150.000.000	0 Org	0	40 Org	250.000.000	0 Org
				8	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				9	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhineka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	150 Org	300.000.000	0 Org
				10	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	0	0 Org	0	0 Org	0	50 Org	200.000.000	0 Org	0	0 Org
				11	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan monev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berbudaya.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tentram.				PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN.	Cakupan persentase peserta yang berpartisipasi dalam segala kegiatan PPWK dan Forum FPK. Cakupan persentase peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan kegiatan bina Ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan.	924.000.000	80%	169.000.000	80%	350.000.000	85%	300.000.000	90%	300.000.000	90%
				1	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				2	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).	Jumlah fasilitator yang mengerti akan pendidikan wawasan kebangsaan.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				3	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target	
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			4	Dialog Optimalisasi Pambauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti pambauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	0	40 Org	69.000.000	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
			5	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	0	0 Org	0	40 Org	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
			6	Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0	0 Kali	0	1 Kali	75.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali
			7	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	100.000.000	0 Kali	0	0 Kali
			8	Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	0	0 Kali & 0 Org	0	0 Kali & 0 Org	0	0 Kali & 0 Org	0	0 Kali & 0 Org	0	0 Kali & 0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				9	Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara (Khusus Sulawesi Barat).	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara (Khusus Sulawesi Barat).	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	25 Org	100.000.000	0 Org
				10	Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				11	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	100.000.000	0 Org
				12	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org
				13	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				14	Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				15	Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				16	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0	0 Org	0	40 Org	200.000.000	0 Org	0	0 Org	0	40 Org
				17	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.	0	0 Lap.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				19	Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	0	40 Org	100.000.000	0 Org	0	0 Org	0	40 Org	100.000.000	0 Org
				20	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				21	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				22	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				27	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0	0 Org	0	40 Org	75.000.000	50 Org	200.000.000	0 Org	0	0 Org
				28	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	40 Org
				29	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
				30	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali
				31	Percepatan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten se-Sulbar.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pembentukan FPK se-Sulbar.	300.000.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target		
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				
				32	Sosialisasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat.	74.000.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org
				33	Peningkatan Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Rangka Revolusi Mental.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan nilai-nilai Bela Negara dalam rangka Revolusi Mental.	300.000.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org
				34	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda se-Sulawesi Barat.	150.000.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org
				35	Pagelaran Seni dan Budaya Pembauran Etnis di Sulawesi Barat.	Jumlah etnis budaya di Sulawesi Barat.	-	0 Etnis Budaya	-	0 Etnis Budaya	-	0 Etnis Budaya	-	0 Etnis Budaya	-	0 Etnis Budaya
				36	Seminar Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Lembaga Demokrasi (Parpol) Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta seminar penguatan wawasan kebangsaan bagi Lembaga Demokrasi (Parpol) Provinsi Sulawesi Barat.	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org
				37	Lomba Film Pendek Bertemakan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba film pendek "Wawasan Kebangsaan".	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	20 Kelompok

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)		THN 4 (2021)		Target	
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
				38 Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Dini tentang Pancasila dan Antisipasi Terhadap Radikalisme Bagi Pelajar dan Mahasiswa.	Jumlah peserta yang mengikuti seminar dan lomba-lomba pada Bulan Lahir Pancasila (JUNI).	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	120 Org
				39 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	100.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali
Jumlah Pagu Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasa Kebangsaan.					924.000.000		344.000.000		500.000.000		600.000.000		950.000.000		
TOTAL JUMLAH ANGGARAN					5.217.605.729		3.395.000.000		4.802.000.000		5.223.119.473		6.774.037.935		

Mamuju,

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT

KASUBAG. PROGI

Drs. H.MUHAMMAD RAHMAT, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

EKA GEN
Pangkat
NIP : 198306

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
1.486.300.000	60 Bln	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
525.500.000	35 Org PTT & 4000 Surat	Sekretariat	Mamuju
24.550.000	36 bulan	Sekretariat	Mamuju
65.000.000	22 Macam	Sekretariat	Mamuju
57.000.000	3.600 lembar fotocopy & spanduk balho.	Sekretariat	Mamuju
58.250.000	10 Kali Terbit	Sekretariat	Mamuju
75.000.000	1272 Kotak	Sekretariat	Mamuju

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
305.250.000	40 koordinasi	Sekretariat	Jakarta & Mamuju
375.750.000	75 koordinasi	Sekretariat	Mamuju, Mateng, Matra, Majene, Mamasa & Polman
605.636.403	5 Paket & 60 Bln	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov. Sulbar
259.386.403	8 Unit	Sekretariat	Mamuju
-	7 Paket	Sekretariat	Mamuju
-	9 Paket	Sekretariat	Mamuju
-	4 Thn	Sekretariat	Mamuju
-	60 Bln	Sekretariat	Mamuju
80.250.000	60 Bln	Sekretariat	Mamuju
145.500.000	60 Bln	Sekretariat	Mamuju

820.850.000

801.857.054

18.992.946

175.000.000

18.992.946

156.007.054

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
45.500.000	2 Paket	Sekretariat	Mamuju
75.000.000	1 Dok.	Sekretariat	Mamuju
139.700.000	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
139.700.000	95%	Sekretariat	Mamuju
925.000.000	95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
50.000.000	32 Org	Sekretariat	Mamuju, Makassar & Jakarta serta sekitarnya.
150.000.000	200 Org	Sekretariat	Mamuju
100.000.000	50 Org	Sekretariat	Mamuju

743.084.574

658.118.794

450.000.000

208.118.794

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
75.000.000	200 Org	Sekretariat	Mamuju
150.000.000	1 Tim	Sekretariat	Mamuju
400.000.000	20 Kali & 500 Org	Sekretariat	Mamuju
407.500.000	BB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
12.500.000	8 Lap.	Sekretariat	Mamuju
12.500.000	4 Lap.	Sekretariat	Mamuju
200.000.000	6 Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Mamuju
15.000.000	8 Dok. RKA/DPA	Sekretariat	Mamuju

62.103.112

52.423.060

9.680.052

33.603.112

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
15.000.000	8 Dok. RKA/DPA	Sekretariat	Mamuju
80.000.000	20 Lap.	Sekretariat	Mamuju
15.000.000	15 Lap	Sekretariat	Mamuju
57.500.000	2 Lap.	Sekretariat	Mamuju
3.564.136.403			
915.000.000	40 Orang & 6 Kab.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
225.000.000	200 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
0	0 Kab	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar

9.680.052

23.923.060

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
100.000.000	6 Kab.	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
100.000.000	120 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
0	1 Dok.	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
0	0 Laporan	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
-	50 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
75.000.000	80 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
-	120 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
11	12	13	14
0	0 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
80.000.000	80 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
75.000.000	2 Dokumen Laporan	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
85.000.000	80 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
100.000.000	40 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
0	0 Org & 0 Kali Pertemuan	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
75.000.000	3 Dok. 37 Org & 3 Pelaksanaan	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
	6 Kabupaten	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
85.000.000	40 Orang & 6 Kab.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
85.000.000	200 Org	Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik	Pemprov.Sulbar
1.000.000.000			
500.000.000	40 Org, 42 Indikator & 16 Parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
100.000.000	16 Partai	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
200.000.000	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
0	12 Partai	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
200.000.000	25 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	6 Kabupaten
500.000.000	40 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
75.000.000	2 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
75.000.000	4 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
85.000.000	4 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
95.000.000	3 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
85.000.000	2 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
0	1 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
85.000.000	1 Dokumen Laporan	Bidang Politik Dalam Negeri	Pemprov.Sulbar
1.000.000.000			
825.000.000	40 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
-	80 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	40 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
150.000.000	40 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	1 Kali	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	3 Kali	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	1 Kali	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
175.000.000	160 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
300.000.000	3 Kali	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
200.000.000	40 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	5 Kali & 40 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
275.000.000	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
150.000.000	120 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
125.000.000	120 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	1 Kali & 40 Org	Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
-	1 Tim	Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama & Organisasi Kemasyarakatan	Pemprov.Sulbar
1.100.000.000			
75.000.000	40 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
0	1 Lap.	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
75.000.000	80 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
0	80 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	150 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	50 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
0	0 Lap.	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
925.000.000	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
0	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	1 Kali	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	1 Kali	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Kali & 0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
0	25 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
200.000.000	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
75.000.000	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Lap.	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022) Rp Jt	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
11	12	13	14
0	80 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
0	80 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
100.000.000	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Kali	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
-	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14
-	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
-	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
-	40 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
-	0 Etnis Budaya	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
-	0 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
250.000.000	20 Kelompok	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar

THN 5 (2022)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp Jt			
11	12	13	14
300.000.000	120 Org	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
0	0 Kali	Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	Pemprov.Sulbar
1.000.000.000			
7.664.136.403			

10 MEI 2020

RAM DAN PELAPORAN

TA ASYUNI, SEt : Penata Tk.I
621 200604 2 016

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 5 (2022)			
Rp Jt			
11	12	13	14

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

OPD Penanggung Jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
					2018		2019		2020		2021		20
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Cakupan layanan administrasi perkantoran.	Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	929,00	12 Bulan	1.113,00	12 Bulan	1.387,00	12 Bulan	1.163,00	12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur.	Paket dan Bulan	5 dan 12	1 Paket dan 12 Bulan	1 Paket dan 12 Bulan	251,00	1 Paket dan 12 Bulan	312,00	1 Paket dan 12 Bulan	492,00	1 Paket dan 12 Bulan	562,00	1 Paket dan 12 Bulan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Cakupan persentase disiplin aparatur.	Persen	79%	80%	80%	74,00	85%	98,00	90%	154,00	95%	157,00	95%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Nilai kompetensi dan integritas ASN.	Nilai	75	80	80	461,00	85	476,00	90	426,00	95	658,00	95

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
					2018		2019		2020		2021		20
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Nilai	Proses penilaiannya berdasarkan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	CC	110,00	CC	124,00	B	134,00	B	74,00	B
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Peningkatan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Terhadap Pencegahan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) di Daerah.	Kab	6	6	6	470,00	6	420,00	6	628,00	6	1.775,00	6
	Peningkatan Efektivitas dan Sinergitas dalam Pencegahan konflik, Penghentian konflik dan Pemulihan konflik (P3) melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Koordinasi Yang Terpadu.	Tim Terpadu	Tim Terpadu	Tim Terpadu	Tim Terpadu	-	Tim Terpadu	130,00	Tim Terpadu	100,00	Tim Terpadu	200,00	Tim Terpadu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2018		2019		2020		2021		20	
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Fasilitas Politik Dalam Negeri.	Cakupan persentase peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pengembangan etika politik dalam segala aspek kehidupan berdemokrasi.	Persentase	80%	82%	90%	75,00	93%	500,00	95%	250,00	95%	1.275,00	95%	
	Cakupan persentase verifikasi bantuan keuangan Parpol, IDI & Data Base Parpol serta yang ASN yang mengikuti perkembangan evaluasi politik di daerah.	Persentase	68%	78%	82%	394,00	85%	601,00	90%	500,00	90%	850,00	90%	
Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas dan Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Masyarakat.	Cakupan persentase peserta yang berpartisipasi pada kegiatan Ormas, dan beberapa sosialisasi, desiminasi peraturan pemerintah dan permendagri tentang Ormas.	Persentase	87%	89%	90%	90,00	92%	350,00	94%	-	96%	250,00	96%	
	Persentase penegakan PERDA melalui Perda tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkoba dan cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh.	Persentase	87%	65%	89%	191,00	90%	175,00	92%	550,00	94%	750,00	94%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2018		2019		2020		2021		20	
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Karakter Bangsa	Cakupan persentase peserta mengikuti seluruh kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan kegiatan bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan.	Persentase	65%	70%	75%	244,00	80%	350,00	85%	300,00	90%	1.000,00	90%	
	Cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pada pembinaan karakter bangsa.	Persentase	75%	78%	80%	100,00	85%	150,00	85%	300,00	90%	550,00	90%	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Peningkatan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Terhadap Pencegahan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) di Daerah.	Kab	6	6	6	470,00	6	420,00	6	628,00	6	1.775,00	6	
	Peningkatan Efektivitas dan Sinergitas dalam Pencegahan konflik, Penghentian konflik dan Pemulihan konflik (P3) melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Koordinasi Yang Terpadu.	Tim Terpadu	Tim Terpadu	Tim Terpadu	Tim Terpadu	-	Tim Terpadu	130,00	Tim Terpadu	100,00	Tim Terpadu	200,00	Tim Terpadu	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
					2018		2019		2020		2021		20
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Cakupan persentase peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pengembangan etika politik dalam segala aspek kehidupan berdemokrasi.	Persentase	80%	82%	90%	75,00	93%	500,00	95%	250,00	95%	1.275,00	95%
	Cakupan persentase verifikasi bantuan keuangan Parpol, IDI & Data Base Parpol serta yang ASN yang mengikuti perkembangan evaluasi politik di daerah.	Persentase	68%	78%	82%	394,00	85%	601,00	90%	500,00	90%	850,00	90%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Cakupan persentase peserta yang berpartisipasi pada kegiatan Ormas, dan beberapa sosialisasi, desiminasi peraturan pemerintah dan permendagri tentang Ormas.	Persentase	87%	89%	90%	90,00	92%	350,00	94%	-	96%	250,00	96%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Persentase penegakan PERDA melalui Perda tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkoba dan cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh.	Persentase	87%	65%	89%	191,00	90%	175,00	92%	550,00	94%	750,00	94%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
					2018		2019		2020		2021		20
					Target (Capaian)	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan persentase peserta mengikuti seluruh kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan kegiatan bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan.	Persentase	65%	70%	75%	244,00	80%	350,00	85%	300,00	90%	1.000,00	90%
	Cakupan persentase peserta yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pada pembinaan karakter bangsa.	Persentase	75%	78%	80%	100,00	85%	150,00	85%	300,00	90%	550,00	90%

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
1.200,00	60 Bulan	5.792,00	Sekretariat
801,00	5 Paket dan 60 Bulan	2.418,00	
267,00	95%	750,00	
1.153,00	95	1.153,00	

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
95,00	B	537,00	
2.625,00	6	5.918,00	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
100,00	Tim Terpadu	530,00	

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
1.500,00	95%	3.600,00	Bidang Politik
900,00	90%	3.245,00	
300,00	96%	990,00	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Organisasi Masyarakat
1.050,00	94%	2.716,00	

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
1.250,00	90%	3.144,00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
850,00	90%	1.950,00	
2.625,00	6	5.918,00	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
100,00	Tim Terpadu	530,00	

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
1.500,00	95%	3.600,00	Bidang Politik
900,00	90%	3.245,00	
300,00	96%	990,00	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Organisasi Masyarakat
1.050,00	94%	2.716,00	

22	Kondisi Kineja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Rp (Juta)	Target	
14	15	16	17
1.250,00	90%	3.144,00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
850,00	90%	1.950,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3			4	5	
		1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
		1	19	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1	19	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya fasilitas dan SDM yang berkualitas dan memenuhi pelayanan prima.
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan Jumlah Pegawai PTT

						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan listrik.
						3	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah alat tulis kantor yang terpakai.
						4	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan.	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan.
						5	Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah jasa publikasi, dokumentasi dan iklan di mass media.
						6	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah penyediaan makan minum, rapat, dan tamu serta pegawai selama setahun.
						7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah selama setahun.
						8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	Tercapai koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1	19	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana SKPD.	
						1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.	Jumlah pengadaan mobil operasional, mobil jabatan eselon III dan motor.
						2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor.
						3	Pengadaan Komputer/jaringan Komputer & Kelengkapannya.	Jumlah pengadaan komputer dekstop, laptop dan printer.
						4	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi.	Jumlah pengadaan CCTV, Camera Drone dan Camera Vios.
						5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	Jumlah ruangan yang terpelihara.
						6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.	Pemeliharaan mobil jabatan dan gaji sopir (1 unit mobil jabatan dan 1 orang sopir selama 12 bulan)

						7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas mobil dan motor
						8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor selama setahun
						9	Pengadaan Sistem Manajemen Terpadu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar.	Jumlah pengadaan sistem manajemen terpadu.
						10	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.
Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1	19	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.		Terwujudnya disiplin aparatur.
						1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang di adakan.

Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1	19	01	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya kualitas kapasitas SDM aparatur.
						1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat-diklat intelijen dan diklat khusus lainnya.
						2 Rapat Kerja Teknis & Sinkronisasi Kegiatan KesbangPol. se-Sulawesi Barat.	Terciptanya keselarasan program kegiatan kesatuan bangsa dan politik prov. Sulbar
						3 Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah.	Jumlah peserta yg mengikuti rakor tim verifikasi, monev & pelaporan Bantuan Dana Hibah.

						4	Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah.	Memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Prov.Sulbar
						6	Rapat Koordinasi serta Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.	Jumlah peserta monev pelaksanaan penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.
						7	Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis.	Jumlah tim fasilitasi pengolah data, analisis informasi & kajian strategis.
						8	Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA).	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FORKOPIMDA.
Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1	19	01	05		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	Terciptnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

						1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang telah disusun.
						2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
						3	Penyusunan Renstra-Renja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
						4	Penyusunan RKA/DPA - SKPD.	Meningkatnya pemahaman dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran.
						5	Penyusunan RKA-P/ DPPA - SKPD.	Meningkatnya pemahaman dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran perubahan.
						6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.	Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. program kegiatan pada badan kesbangpol

						7	Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ.	Meningkatnya pemahaman dalam proses penyusunan dan pelaporan yang sistematis dan akuntabel
						8	Penyusunan ANJAB dan ABK	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah tersusun
SEKRETARIAT								

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
 PERIODE TAHUN 2017 - 2022

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2017) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA P					
	THN 1 (2018)		THN 2 (2019)		THN 3 (2020)	
	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt
6	7		8		9	
	12 Bln	1.266.920.000	12 Bln	1.116.023.534	12 Bln	1.215.082.743
4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	350.750.000	4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	350.450.000	4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	375.750.000

36 Bln	36 Bln	35.000.000	36 Bln	24.000.000	36 Bln	30.000.000
21 item	21 item	50.000.000	21 item	40.000.000	21 item	40.000.000
3.600 lembar dan spanduk/ baliho 41 lembar 3x4	3.600 lembar dan spanduk / baliho 41 lembar 3x4	50.000.000	3.600 lembar dan spanduk/ baliho 41 lembar 3x4	30.000.000	3.600 lembar dan spanduk/ baliho 41 lembar 3x4	30.000.000
10 kali terbit	10 kali terbit	50.000.000	10 kali terbit	35.000.000	10 kali terbit	40.000.000
1227 Kotak	1227 Kotak	54.920.000	1227 Kotak	35.000.000	1227 Kotak	50.000.000
32 Koordinasi	32 Koordinasi	325.750.000	32 Koordinasi	251.550.000	32 Koordinasi	300.045.750
68 Rapat-Rapat Koordinasi	68 Rapat-Rapat Koordinasi	350.500.000	68 Rapat-Rapat Koordinasi	350.023.534	68 Rapat-Rapat Koordinasi	349.286.993

	1 Paket, Thn, & 12 Bln	1.916.700.000	1 Paket, Thn, & 12 Bln	618.076.174	1 Paket, Thn, & 12 Bln	242.159.146
0 Paket	3 Paket	1.114.300.000	1 Paket	108.576.174	0 Paket	-
7 Jenis	7 Jenis	76.100.000	7 Jenis	50.000.000	7 Jenis	-
0 Paket	2 Paket	151.800.000	1 Paket	8.000.000	0 Paket	-
0 Paket	5 Paket	81.800.000	1 Paket	25.000.000	0 Paket	-
0 Thn	1 Thn	100.000.000	1 Thn	50.000.000	1 Thn	-
1 Tahun	1 Tahun	115.300.000	1 Tahun	150.750.000	1 Tahun	110.250.000

19 Unit Kendaraan	19 Unit Kendaraan	163.200.000	19 Unit Kendaraan	200.750.000	19 Unit Kendaraan	125.750.000
39 Unit	39 Unit	114.200.000	39 Unit	25.000.000	39 Unit	6.159.146
0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-
0 Dokumen	0 Dok.	-	0 Dok.	-	0 Dok.	-
1 Stel	1 Stel	174.687.169	1 Stel	99.978.424	1 Stel	154.304.860
78 Stel	78 Stel	174.687.169	77 Stel	99.978.424	78 Stel	154.304.860

Orang & Kali	Orang & Kali	907.065.254	Orang & Kali	643.084.574	Orang & Kali	621.443.246
2 Org	2 Org	50.000.000	5 Org	75.000.000	1 Org	25.000.000
0 Org	50 Org	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	50 Org	125.000.000
0 Org	40 Org	50.000.000	0 Org	-	0 Org	-

0 Org	40 Org	350.000.000	50 Org	418.084.574	40 Org	221.443.246
0 Org	40 Org	55.000.000	0 Org	-	40 Org	50.000.000
0 Org	30 Org	50.000.000	0 Org	-	0 Org	-
12 Kali & 40 Org	4 Kali & 100 Org	252.065.254	4 Kali & 100 Org	-	4 Kali & 100 Org	200.000.000
5 Lap., 1 Dok.Renstra, 1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap.Monev	5 Lap., 1 Dok.Re nstra, 1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap.Mo nev	63.603.112	5 Lap., 1 Dok.Renstra, 1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap.Monev	32.794.997	5 Lap.,1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap.Mo nev	52.423.060

2 Lap.	2 Lap.	5.000.000	1 Lap.	3.500.000	2 Lap.	4.500.000
1 Dok.	1 Dok.	5.000.000	1 Dok.	3.500.000	1 Dok.	4.500.000
1 Dok. Renstra & 1 Renja	1 Dok. Ren stra & 1 Renja	5.000.000	1 Dok. Renja	3.000.000	1 Dok. Re nja	5.000.000
2 Dok. RKA/DPA	2 Dok. RKA /DPA	5.000.000	2 Dok. RKA /DPA	5.000.000	2 Dok. RKA /DPA	5.000.000
2 Dok. RKA/DPPA	2 Dok. RKA /DPPA	5.000.000	1 Tahun	3.500.000	2 Dok. RKA /DPPA	5.000.000
4 Tahun	4 Tahun	33.603.112	1 Tahun	3.500.000	4 Tahun	23.923.060

0 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	5.000.000	3 Dokumen Laporan	5.000.000	3 Dokumen Laporan	4.500.000
2 Dok.	0 Lap.	-	2 Lap.	5.794.997	2 Lap.	-
		4.328.975.535		2.509.957.703		2.285.413.055

INDIKATIF

PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	BIDANG / PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
THN 4 (2021)		THN 5 (2022)				
Target	Rp Jt	Target	Rp Jt			
10		11		12	13	14
12 Bln	1.163.922.625	12 Bln	1.200.338.065	60 Bln	Sekretariat	Kesbang Pol.
4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	395.750.000	4.000 Surat & Jasa Non PNS 35 Orang	400.475.000	20.000 Surat & Jasa Non PNS 175 org	Sekretariat	Mamuju

36 Bln	30.000.000	36 Bln	30.000.000	180 Bln	Sekretariat	Mamuju
21 item	40.000.000	21 item	40.000.000	105 item	Sekretariat	Mamuju
3.600 lembar dan spanduk / baliho 41 lembar 3x4	30.000.000	3.600 lembar dan spanduk/ baliho 41 lembar 3x4	30.000.000	18.000 lembar dan spanduk / baliho 205 lembar lembar 3x4	Sekretariat	Mamuju
10 kali terbit	40.000.000	10 kali terbit	45.000.000	50 Kali Terbit	Sekretariat	Mamuju
1227 Kotak	50.000.000	1227 Kotak	50.000.000	6.135 Kotak	Sekretariat	Mamuju
32 Koordinasi	275.450.000	32 Koordinasi	300.425.000	160 Koordinasi	Sekretariat	Jakarta & Mamuju
68 Rapat-Rapat Koordinasi	302.722.625	68 Rapat-Rapat Koordinasi	304.438.065	340 Rapat-Rapat Koordinasi	Sekretariat	Mamuju,Mateng, Matra,Majene,Mamasa &Polman

1 Paket, Thn, & 12 Bln	562.938.872	1 Paket, Thn, & 12 Bln	4.946.254.654	5 Paket, 5 Thn & 60 Bln	Sekretariat	Kesbang Pol.
1 Paket	150.000.000	1 Paket	250.000.000	8 Paket	Sekretariat	Mamuju
7 Jenis	25.000.000	7 Jenis	60.000.000	35 Paket	Sekretariat	Mamuju
0 Paket	-	1 Paket	50.000.000	9 Paket	Sekretariat	Mamuju
1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	9 Paket	Sekretariat	Mamuju
0 Thn	50.000.000	1 Thn	50.000.000	4 Thn	Sekretariat	Mamuju
1 Tahun	125.725.000	1 Tahun	100.850.000	5 Tahun	Sekretariat	Mamuju

19 Unit Kendaraan	150.825.000	19 Unit Kendaraan	206.007.054	95 Unit Kendaraan	Sekretariat	Mamuju
39 Unit	11.388.872	39 Unit	35.000.000	195 Unit	Sekretariat	Mamuju
0 Paket	-	1 Paket	200.000.000	1 Paket	Sekretariat	Mamuju
0 Dok.	-	1 Dok.	3.944.397.600	1 Dok.	Sekretariat	Mamuju
1 Stel	157.327.758	1 Stel	267.242.558	5 Stel	Sekretariat	Kesbang Pol.
80 Stel	157.327.758	82 Stel	267.242.558	395 Stel	Sekretariat	Mamuju

Orang & Kali	608.118.794	Orang & Kali	1.000.000.000	Orang & Kali	Sekretariat	Kesbang Pol.
1 Org	25.000.000	6 Org	100.000.000	15 Org	Sekretariat	Mamuju, Makassar & Jakarta serta sekitarnya.
50 Org	125.000.000	50 Org	150.000.000	250 Org	Sekretariat	Mamuju
0 Org	-	50 Org	50.000.000	130 Org	Sekretariat	Mamuju

40 Org	250.000.000	50 Org	350.000.000	220 Org	Sekretariat	Mamuju
0 Org	-	40 Org	50.000.000	200 Org	Sekretariat	Mamuju
0 Org	-	0 Org	50.000.000	60 Org	Sekretariat	Mamuju
4 Kali & 100 Org	208.118.794	4 Kali & 100 Org	250.000.000	20 Kali & 500 Org	Sekretariat	Mamuju
5 Lap., 1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap. Monev	74.420.324	5 Lap., 1 Renja, 1 RKA, 1 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP, 4 Lap. Monev	145.608.010	25 Lap. 1 Dok. Renstra, 5 Renja, 5 RKA, 5 RKA-P, 1 Profil & 1 SOP 20 Lap. Monev	Sekretariat	Kesbang Pol.

2 Lap.	4.500.000	2 Lap.	5.300.000	9 Lap.	Sekretariat	Mamuju
1 Dok.	4.500.000	1 Dok.	5.308.010	5 Dok.	Sekretariat	Mamuju
1 Dok. Renja	5.420.324	1 Dok. Renja	5.000.000	6 Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Mamuju
2 Dok. RKA /DPA	5.000.000	2 Dok. RKA /DPA	7.500.000	10 Dok. RKA/DPA	Sekretariat	Mamuju
2 Dok. RKA /DPPA	5.000.000	2 Dok. RKA /DPPA	7.500.000	8 Dok. RKA/DPA	Sekretariat	Mamuju
4 Tahun	25.000.000	4 Tahun	50.000.000	17 Tahun	Sekretariat	Mamuju

3 Dokumen Laporan	5.000.000	3 Dokumen Laporan	15.000.000	15 Dokumen Laporan	Sekretariat	Mamuju
2 Lap.	20.000.000	2 Lap.	50.000.000	8 Dok.	Sekretariat	Mamuju
	2.566.728.373		7.559.443.287			

820.850.000

801.857.054

18.992.946

175.000.000

18.992.946

156.007.054

743.084.574

658.118.794

450.000.000

208.118.794

62.103.112

52.423.060

9.680.052

33.603.112

9.680.052

23.923.060